

E

Jatman, Darmanto

PUSAT DOKUMENTASI SASTRA H.B. JASSIN

Jakarta: Harian Kompas

Tahun: 39

Nomor: 152

Senin, 1 Desember 2003

Halaman: 6

Kolom: 5--9

DKI Jakarta Harus Proaktif Mendorong Redistribusi Populasi

Pengamat sosial Imam B Prasadjo mengatakan, faktor masyarakat komunal menjadikan mudik tidak bisa digantikan dengan SMS, kartu lebaran, dan telepon. "Di kampung mereka menggelar reuni besar-besaran lewat kesempatan Idul Fitri dengan anggota komunitas yang cukup luas," kata Imam.

Tradisi ini, tambah Imam, berbeda dengan di Amerika Serikat. "Di sana juga ada mudik, tetapi struktur masyarakatnya hanya terpusat pada keluarga inti (*nuclear family*) sehingga mereka bisa bertemu di mana-mana, tidak harus di kampung halaman," katanya.

Imam menegaskan, karena migrasi akan selalu ada dan terjadi serempak, pemerintah harus memberikan fasilitas umum yang lebih baik. "Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk membangun jalan antarprovinsi dan jalan tol yang baik untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik," katanya.

Menurut Imam, swasta perlu dilibatkan untuk berkompetisi menangani mudik guna mengurangi monopoli badan usaha milik negara (BUMN). "Harus ada alternatif pelayanan transportasi selain pemerintah," katanya.

Akan sangat baik, kata Imam, jika makin banyak perusahaan menyelenggarakan arus mudik yang terorganisasi. "Saya kira jangan hanya pemerintah yang mengurus mudik ini," katanya.

Senada dengan Imam, Darmanto Jatman, psikolog yang juga budayawan, menambahkan, tradisi berkumpul dalam keluarga besar di Jawa mempunyai dimensi kemanusiaan.

JAKARTA, KOMPAS — Struktur masyarakat yang masih komunal (*communal society*) menjadikan mudik tidak bisa tergantikan dengan sarana lain, di samping ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah. Untuk itu, Pemerintah DKI Jakarta harus proaktif bekerja sama dengan provinsi lain untuk membuka lapangan kerja di daerah, agar hal itu tidak lagi terjadi atau paling tidak mengurangi arus urbanisasi ke Jakarta.



CHANDRA ADHIE NUGROHO

Darmanto Jatman

”Sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma tentang libur, dari sekadar perayaan agama menjadi perayaan budaya.”

— DARMANTO JATMAN



ILHAM KHOIRI

Imam B Prasadjo

”Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk membangun jalan antarprovinsi dan jalan tol yang baik untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik.”

— IMAM B PRASODJO

Sebab, eksistensi seseorang tidak akan mempunyai makna tanpa kehadiran orang lain dalam sebuah jaringan kekeluargaan yang besar.

"Tradisi berkumpul itu sudah ada jauh sebelum agama Islam masuk ke tanah Jawa. Jadi, tingkat kepentingan mudik adalah untuk berkumpul dalam keluarga, bukan untuk sekadar merayakan hari raya," katanya.

Darmanto menambahkan, ikut sertanya masyarakat Jawa non-Muslim mudik bukan untuk merayakan Idul Fitri, melainkan sekadar ingin berkumpul. "Melihat latar belakangnya, saya kira bisa saja pemerintah memberi solusi mudik tidak sekaligus dilaksanakan pada Idul Fitri," katanya.

Menurut Darmanto, beberapa aktivitas budaya lokal dapat digunakan sebagai perangsang mudik, seperti sekatenan, bersih desa, pertemuan keluarga besar, atau tujuh belasan. Aktivitas itu dapat diadakan berdekatan dengan momen libur sekolah untuk meningkatkan gairah pulang.

"Masyarakat akan sangat ingin pulang jika ada sesuatu yang dapat dikerjakan atau dinikmati di daerah asalnya. Oleh karena itu, peristiwa budaya lokal perlu dikelola dengan baik agar lebih menarik," katanya.

Untuk membagi momen mudik, kata Darmanto, diperlukan usaha bersama masyarakat dan pemerintah dalam mengeksplorasi budaya dan mengatur hari libur agar memungkinkan masyarakat mudik lebih dari sekali dalam setahun. "Sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma tentang libur, dari sekadar

perayaan agama menjadi perayaan budaya, sehingga hari libur juga dapat menjadi produktif bagi perkembangan budaya dan pariwisata lokal," katanya.

Mudik juga mempunyai keuntungan yang besar di sisi budaya. Pada saat mudik, pemuda akan mendapatkan penanaman kembali nilai-nilai "mulia" oleh orang yang lebih tua. Nilai-nilai tersebut penting untuk disegarkan sebagai salah satu pedoman dalam bersikap. Proses ini juga dapat dilakukan untuk melakukan pertukaran budaya dan menimba kebijaksanaan.

Jika sudah pulang satu atau dua kali dalam setahun, kata Darmanto, masyarakat tidak akan lagi memaksakan diri mudik di masa Idul Fitri. "Dengan demikian, kepadatan yang luar biasa, kecelakaan lalu lintas, dan pelayanan yang tidak layak bagi para penumpang dapat dikurangi," katanya.

Pemerintah, kata Darmanto, tidak bisa berkilah bahwa sarana dan prasarana transportasi tidak cukup memenuhi kebutuhan jika dilakukan mudik se-

rempak. "Pemerintah tidak bisa hanya mengeluh, tanpa memberi solusi bagaimana mudik harus dilakukan," katanya.

Ketimpangan

Imam Prasodjo melihat faktor ketimpangan pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mengurangi arus urbanisasi. "Akan sehat jika ada kerja sama antarwilayah untuk mengembangkan ekonomi yang tidak sektoral dan tidak hanya menguatkan ego wilayah. Karena itu, Pemda DKI harus proaktif membentuk sentra-sentra pembangunan di berbagai wilayah agar terjadi redistribusi penduduk," katanya.

Pembangunan yang sentralistik, kata Imam, membuat banyak pekerja di Jakarta memiliki *split family* (keluarga terpisah). Ini terjadi karena mereka tidak mampu menghidupi keluarganya di sini. Mereka hanya menyuplai keluarganya di

kampung. "Keluarga ini potensial menimbulkan arus mudik saat Lebaran," katanya.

Mengutip sensus penduduk Jakarta tahun 2000, Imam menyatakan, hanya 12,65 persen dari 8.324.000 warga Jakarta yang asli Betawi. "Sisanya merupakan kaum migran yang potensial mudik waktu Lebaran, dan 35,16 persennya berasal dari Jawa," katanya.

Untuk membendung fenomena mudik, kata Imam, harus ada kebijakan yang tidak bias lokasi urban dan investasi yang elitis. "Kita perlu membangun pabrik yang membuka lapangan kerja bagi kelas bawah. Masyarakat kelas bawah ini harus ditampung karena mayoritas penduduk kita berpendidikan ren-

dah," katanya.

Kecenderungan investasi hanya di kota besar, kata Imam, membuat kegiatan ekonomi menumpuk di situ, seperti Pulo Gadung atau Tangerang. Itu juga memunculkan lapangan kerja sektor informal yang akan mendukung, seperti angkutan kota, ojek, dan warung makan.

"Karena Jakarta tetap memukau, orang yang datang ke sini rela mendapat gaji rendah karena punya harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sementara di desa, kesempatan kerja saja tak ada," ujar Imam. (K10/K07/K09)